



Fenomena Anggapan Kuliah sebagai *Scam* Ditinjau dari Teori *Fungsionalisme Emile Durkheim*

Much Ahsan Haiki^{1*}, Maria Renata Clarentiyas², Suci Setiawati³, Tresia Cilita
Gultom⁴, Achmad Hufad⁵, Yani Achdiani⁶

¹⁻⁴ Pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

⁵ Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

⁶ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: ahsanhaiki05@student.upi.edu^{1*}, mariarenatac@student.upi.edu², ssucisetiawati31@student.upi.edu³,
tresiacilita@student.upi.edu⁴, achmadhufad@upi.edu⁵, yaniachdiani@upi.edu⁶

*Penulis Korespondensi: ahsanhaiki05@student.upi.edu

Abstract. *The phenomenon of viewing college as a scam has become increasingly discussed among young people as a form of criticism toward the higher education system. This perception arises from the gap between the expectations offered by education and the realities faced by graduates, such as difficulties in obtaining suitable employment, the high cost of education, and uncertainty regarding the value of a degree in improving individual well-being. In addition, persistent inequalities in access to education and the declining relevance of education to labor market demands have further reinforced this viewpoint. This article aims to analyze the phenomenon of college as a scam through the perspective of Émile Durkheim's theory of functionalism. The study employs a literature review method by examining various sources related to higher education, the functions of education, and social change. The findings indicate that this perception is not only associated with issues of educational access and relevance but also reflects a crisis in the goals of education. Education is often viewed as being more oriented toward academic achievement and workforce preparation than toward character development and social integration. From a functionalist perspective, this condition can be understood as a weakening of education's role in fostering social solidarity and preparing individuals to participate effectively in society.*

Keywords: *College As A Scam; Crisis in Educational Goals; Educational Access Inequality; Educational Relevance; Functionalism.*

Abstrak. Fenomena kuliah sebagai scam semakin banyak diperbincangkan di kalangan generasi muda sebagai bentuk kritik terhadap sistem pendidikan tinggi. Anggapan ini muncul karena adanya kesenjangan antara harapan yang ditawarkan pendidikan dengan realitas yang dihadapi lulusan, seperti sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai, tingginya biaya pendidikan, serta ketidakpastian manfaat gelar dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi dan rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja turut memperkuat pandangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kuliah sebagai scam melalui perspektif teori fungsionalisme Émile Durkheim. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, fungsi pendidikan, dan perubahan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa munculnya anggapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan akses dan relevansi pendidikan, tetapi juga mencerminkan adanya krisis tujuan pendidikan. Pendidikan sering kali dipandang lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan persiapan kerja dibandingkan pembentukan karakter serta integrasi sosial. Dalam perspektif fungsionalisme, kondisi ini dapat dipahami sebagai melemahnya fungsi pendidikan dalam menjalankan perannya sebagai institusi yang membentuk solidaritas sosial dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Fungsionalisme; Ketimpangan Akses; Krisis Tujuan Pendidikan; Kuliah Sebagai Scam; Relevansi Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang berlangsung cepat dan kompleks, mencakup globalisasi, digitalisasi, urbanisasi, serta pergeseran nilai-nilai kolektif menuju individualisme yang semakin kuat. Di tengah arus perubahan tersebut, lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi memegang peranan yang semakin strategis sebagai

penyangga integrasi sosial sekaligus agen transmisi nilai, pengetahuan, dan moralitas kolektif. Universitas tidak semata berfungsi sebagai ruang akademik untuk memperoleh gelar, melainkan juga sebagai institusi sosial yang membentuk karakter generasi muda, membangun solidaritas antarindividu, dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sebagai alat utama dalam membentuk masyarakat memainkan peran penting dalam memfasilitasi integrasi sosial dan menciptakan solidaritas yang dalam pengelolaan pendidikan mencakup pengembangan kurikulum, partisipasi mahasiswa, kolaborasi pemangku kepentingan, dan pendekatan inklusif (Almuarif, 2024).

Salah satu kerangka teoritis yang paling berpengaruh untuk memahami peran tersebut adalah teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Émile Durkheim (1858–1917). Teori fungsionalisme Durkheim menekankan peran pendidikan dalam mempertahankan konsensus sosial dan tatanan kemasyarakatan, serta menjadi landasan bagi perkembangan sosiologi pendidikan modern hingga masa kini (Malik & Malik, 2022).

Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem organis yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terhubung, dan setiap lembaga sosial menjalankan fungsi spesifik demi menjaga keseimbangan keseluruhan sistem. Menurut Durkheim, pendidikan menjalankan dua fungsi utama dalam masyarakat industri modern: pertama, mentransmisikan nilai-nilai bersama kepada generasi penerus; dan kedua, mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pembagian kerja yang semakin kompleks (Pope, 1975). Lebih jauh, Durkheim berpendapat bahwa masyarakat hanya dapat bertahan jika anggotanya berbagi keseragaman yang cukup keyakinan, nilai, dan cara berperilaku bersama dan bahwa pendidikan mengabadikan serta memperkuat keseragaman itu dengan menanamkan kesamaan esensial yang dituntut oleh kehidupan kolektif (Pope, 1975).

Dalam perspektif Durkheim, melemahnya ikatan sosial dan norma kolektif berpotensi memunculkan kondisi anomie, yakni keadaan di mana norma kehilangan daya ikatnya dan individu tidak lagi memahami apa yang dianggap normal dalam masyarakatnya. Tanpa rasa solidaritas sosial yang kuat, tatanan masyarakat dapat terguncang. Durkheim meyakini bahwa lembaga pendidikan dapat memberikan regulasi moral yang dibutuhkan masyarakat karena pendidikan secara bersamaan mengajarkan keterampilan beragam yang diperlukan untuk spesialisasi lanjutan sekaligus menyediakan norma dan nilai bersama sebagai perekat kehidupan kolektif (Maunah, 2016).

Gagasan ini menjadi fondasi bagi analisis kelembagaan pendidikan hingga era kontemporer. Teori integrasi sosial yang berakar dari fungsionalisme struktural menjelaskan bagaimana berbagai bagian masyarakat dapat diintegrasikan menjadi sistem yang terkoordinasi

dan terpadu, di mana solidaritas dan kohesi sosial dengan nilai-nilai moral, emosional, dan budaya yang dimiliki bersama menjadi kunci dalam memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, dan mempromosikan stabilitas sosial secara berkelanjutan (Harahap et al., 2023).

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji relevansi fungsionalisme dalam konteks pendidikan dari berbagai sudut pandang. Penelitian mengenai peran pendidikan dalam mempertahankan integrasi sosial melalui lensa sosiologi Durkheim telah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki fungsi penting dalam mempertahankan solidaritas dan kohesi sosial di tengah keberagaman (Harahap et al., 2023). Kajian lain menegaskan bahwa teori fungsional struktural yang sering disebut teori integrasi atau teori konsensus menjelaskan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural dalam kerangka di mana stabilitas sosial selalu dijaga melalui interdependensi bagian-bagian sistem (Maunah, 2016).

Baik Durkheim maupun Parsons berbagi komitmen inti bahwa pendidikan adalah institusi vital untuk menghasilkan individu yang terintegrasi secara sosial dan berbagi nilai, meskipun keduanya berbeda dalam penekanannya Durkheim lebih pada fungsi kohesif, sedangkan Parsons pada fungsi struktural alokasi individu dalam pembagian kerja sosial (Pope, 1975).

Meskipun begitu, terdapat kesenjangan analitis yang belum sepenuhnya tertangani dalam literatur yang ada. Sebagian besar kajian yang telah dilakukan bersifat deskriptif-teoritis dan belum secara mendalam menguji bagaimana teori fungsionalisme Durkheim berhadapan dengan dinamika riil perguruan tinggi di era modern, termasuk isu-isu seperti komersialisasi kampus, ketimpangan akses pendidikan, serta derasnya transformasi digital yang mengubah fungsi sosial universitas secara fundamental. Komersialisasi pendidikan tinggi telah memunculkan sejumlah ancaman terhadap lingkungan sosial dan akademik, termasuk praktik rekrutmen mahasiswa yang agresif, persaingan tidak sehat antarinstansi, serta potensi memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi yang sudah ada (Gao, 2021). Fenomena ini justru sulit dijelaskan hanya dengan kerangka fungsionalis yang cenderung menekankan konsensus dan stabilitas, sehingga memunculkan urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana batas-batas penjelasan teori tersebut dalam menjawab tantangan kontemporer.

Di sinilah letak kebaruan sekaligus urgensi penelitian ini. Belum banyak kajian yang secara kritis dan sistematis mengkaji relevansi sekaligus keterbatasan teori fungsionalisme Durkheim dalam memahami peran dan disfungsi lembaga pendidikan tinggi di era kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat yang tengah menghadapi tekanan globalisasi, digitalisasi, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Mengisi

kesenjangan ini penting karena pemahaman yang tepat dan kritis terhadap fungsi sosial perguruan tinggi dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat (Almuarif, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori fungsionalisme Émile Durkheim dalam memahami peran dan fungsi sosial perguruan tinggi di era modern, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan perspektif tersebut dalam menghadapi kompleksitas persoalan pendidikan tinggi kontemporer, termasuk komersialisasi, kesenjangan akses, dan transformasi digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Émile Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai institusi yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menjaga keteraturan serta stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, pendidikan merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi penting dalam mentransmisikan nilai, norma, dan moral kepada generasi muda. Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk agar mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial serta memiliki kesadaran kolektif yang mendukung terciptanya integrasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan masyarakat (Malik & Malik, 2022).

Menurut Durkheim, pendidikan juga berfungsi mempersiapkan individu untuk menghadapi pembagian kerja dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Perguruan tinggi berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja sekaligus membangun solidaritas organik, yaitu bentuk solidaritas yang lahir dari saling ketergantungan antarindividu dengan keahlian yang berbeda. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak hanya menjadi sarana memperoleh gelar akademik, tetapi juga berfungsi membentuk pola pikir, keterampilan, karakter, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat modern (Fullan, 2020; Harahap et al., 2023).

Fenomena munculnya anggapan bahwa “kuliah adalah scam” dapat dijelaskan melalui konsep anomie yang dikemukakan Durkheim. Anomie merupakan kondisi ketika norma dan harapan sosial kehilangan daya ikatnya akibat ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Selama ini pendidikan tinggi dipandang sebagai jalan utama menuju kesuksesan dan mobilitas sosial. Namun, meningkatnya jumlah lulusan yang mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, tingginya biaya pendidikan, serta ketidaksesuaian antara

kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja menyebabkan sebagian masyarakat mulai meragukan efektivitas kuliah dalam menjamin masa depan yang lebih baik. Kondisi tersebut memunculkan kebingungan mengenai nilai dan tujuan pendidikan tinggi sehingga lahir pandangan bahwa kuliah tidak lagi memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan (Gao, 2021).

Dalam perspektif fungsionalisme, fenomena kuliah sebagai scam menunjukkan adanya disfungsi pada lembaga pendidikan tinggi. Perguruan tinggi masih menjalankan fungsi sosialisasi, pengembangan pengetahuan, dan pembentukan karakter, tetapi menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan munculnya berbagai profesi baru yang tidak selalu mensyaratkan gelar pendidikan tinggi turut mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap pentingnya kuliah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi tetap memiliki peran penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, memperluas relasi sosial, dan memperkuat integrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan relevansi kurikulum, kualitas pendidikan, dan akses yang lebih merata agar perguruan tinggi dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal (Rohmawati et al., 2025; Harahap et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yaitu mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penggunaan metode campuran dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data numerik mengenai pandangan masyarakat terhadap anggapan bahwa kuliah merupakan jalan menuju kesuksesan, tetapi juga untuk memahami makna, pengalaman, dan alasan yang melatarbelakangi terbentuknya pandangan tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai persepsi individu terhadap hubungan antara pendidikan tinggi dan kesuksesan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami pengalaman, pandangan, serta interpretasi informan mengenai posisi pendidikan tinggi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Abdussamad, 2021).

Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok informan, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pemilihan kedua kelompok tersebut dilakukan secara purposif

dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap topik penelitian (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara lebih mendalam, sekaligus tetap berpedoman pada pokok-pokok pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Sugiyono, 2023).

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis ini mengacu pada model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2014). Sementara itu, data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana, seperti perhitungan frekuensi, persentase, dan mengelompokkan jawaban responden (Sugiyono, 2023). Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan hasil kuesioner (Creswell & Creswell, 2018). Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu pandangan masyarakat terhadap kuliah sebagai mitos atau jalan menuju kesuksesan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan rekonstruksi data kualitatif mengenai dinamika persepsi mahasiswa terhadap fenomena anggapan bahwa "kuliah itu scam". Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam bersama mahasiswi program studi Manajemen Resort dan Leisure (MRL) angkatan 2025 (Anas & Elsi) dipadukan dengan triangulasi data angket terbuka (Google Form) untuk memotret realitas secara makro. Proses pengumpulan data ini dilaksanakan guna mengevaluasi relevansi, ketimpangan akses, serta fungsionalisme pendidikan tinggi di era kontemporer. Seluruh temuan lapangan dianalisis secara kritis dengan mengkontekstualisasikan pada konsep dasar sosiologi fungsionalisme kontemporer.

Gejala Anomi Akademik dan Devaluasi Nilai Ijazah

Institusi pendidikan dalam kacamata fungsionalisme mengemban tugas utama sebagai agen sosialisasi moral yang mentransmisikan nilai-nilai kejujuran dan disiplin demi menjaga integrasi sosial di masyarakat (Harahap, 2023). Namun, realitas kontemporer memotret lahirnya kondisi anomi situasi ketika regulasi moral di dalam institusi melemah akibat pergeseran metode evaluasi yang rentan terhadap manipulasi (Prawira, 2024). Perubahan

makna dan disonansi nilai dalam institusi pendidikan ini memicu kegagalan fungsi adaptasi lembaga tersebut di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, informan mengungkapkan kekecewaan struktural terhadap integritas pelaksanaan ujian daring yang dinilai marak disalahgunakan untuk menyontek. Lemahnya sanksi institusional terhadap kecurangan akademik tersebut menciptakan iklim kompetisi yang bias. Informan Anas dan Elsi berpendapat bahwa sistem pendidikan harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kejujuran akademik, terutama pada sistem ujian daring yang saat ini sering disalahgunakan untuk menyontek (Wibowo, 2022).

Mereka merasa ijazah kehilangan nilai nyatanya ketika mahasiswa yang melakukan kecurangan justru mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada mereka yang jujur, sehingga sistem evaluasi harus diperbaiki agar mencerminkan kemampuan asli siswa. Kondisi anomi ini berimplikasi langsung pada devaluasi makna kemanfaatan ijazah. Selebar kertas kelulusan tidak lagi sakral sebagai simbol kapasitas intelektual-moral, melainkan sekadar komoditas formalitas mekanistik akibat komodifikasi pendidikan (Windhiasih & Subroto, 2022). Data angket kualitatif memperkuat narasi ini, di mana beberapa responden skeptis mengungkapkan bahwa materi perkuliahan kini mengalami demistifikasi karena pengetahuan dapat diakses secara mandiri melalui internet. Ketidakpastian hilir di dunia kerja turut dipotret oleh salah satu responden (08/06/2026 19:49:12) yang menyatakan bahwa tingginya biaya kuliah tidak sebanding dengan kepastian profesi karena belum ada jaminan untuk mendapat pekerjaan yang baik dan gaji yang sesuai dengan gelar. Ketika lembaga formal gagal mempertahankan sakralisasi nilai kejujuran dan kesetaraan, fungsi pendidikan dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil akan mengalami kemunduran sistemik (Malik & Malik, 2022).

Disrupsi Karier Digital dan Kemacetan Fungsi Meritokrasi

Fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa pendidikan tinggi bertindak sebagai mekanisme meritokrasi yang berfungsi menyeleksi dan mengalokasikan peran sosial individu berdasarkan bakat serta usahanya. Sentimen kuliah sebagai scam mengemuka sebagai wujud resistensi ketika fungsi alokasi peran tersebut mengalami kemacetan struktural di tengah disrupsi teknologi digital.

Disrupsi Karier Digital vs Stabilitas Pendidikan

Hadirnya pilihan karier non-konvensional, seperti menjadi influencer atau konten kreator, menawarkan percepatan akumulasi materi tanpa melalui proses birokrasi akademik yang rigid. Gejala pergeseran ruang sosial ini didorong oleh proses mediatisasi dan hiper mediatisasi, dimana otoritas pengetahuan dan pengakuan sosial kini banyak dikonstruksi ulang melalui ruang digital (Rohmawati et al., 2025). Konstruksi karier pemuda di era digital ini

menawarkan peluang sekaligus ketidakpastian yang nyata (Sutopo, 2021). Kendati demikian, informan wawancara secara tegas menolak tren mengabaikan pendidikan formal demi mengejar popularitas digital instan. Penolakan tersebut didasari pada aspek keberlanjutan karier; pekerjaan sebagai influencer dianggap memiliki masa tren tertentu dan tidak akan bertahan selamanya, sedangkan pendidikan memberikan peluang karir yang lebih stabil dan jangka panjang hingga masa pensiun. Selain itu, terdapat dimensi tanggung jawab sosial, di mana seorang influencer seharusnya memiliki latar belakang pendidikan yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang positif kepada pengikutnya.

Kesenjangan Ijazah Formal dan Kebutuhan Industri

Meskipun informan mempertahankan rasionalitas pentingnya pendidikan, struktur makro ketenagakerjaan menunjukkan adanya disfungsi alokasi peran di masyarakat kontemporer (Malik & Malik, 2022). Berdasarkan data angket kualitatif, mayoritas responden sepakat bahwa di dunia kerja kontemporer, ijazah mengalami pergeseran fungsi dominasi. Responden menegaskan bahwa keterampilan dan pengalaman jauh lebih berpengaruh dalam dunia kerja saat ini dibandingkan sekadar modal ijazah kuliah tertulis. Antara kepemilikan ijazah formal dan kecakapan praktis idealnya berada dalam posisi yang seimbang (*balance*). Ketika kurikulum universitas lambat beradaptasi dengan spesifikasi kerja modern, lulusan perguruan tinggi akan mengalami devaluasi ijazah di pasar tenaga kerja (Windhiasih & Subroto, 2022). Kemacetan fungsi meritokrasi inilah yang mendorong meluasnya stigma bahwa perkuliahan merupakan bentuk investasi yang mengecewakan (Prasetyo & Kurniawan, 2023).

Ketimpangan Akses Finansial dan Reproduksi Kelas Sosial

Harmoni masyarakat modern sangat bergantung pada akses mobilitas sosial yang adil demi menciptakan tatanan yang stabil. Kebalikannya, komodifikasi pendidikan tinggi kontemporer melahirkan hambatan struktural yang timpang, yang pada gilirannya mengancam ekuitas pendidikan dan memperlebar jurang pemisah sosial (Gao, 2021). Berdasarkan data kuesioner terbuka, faktor determinan utama yang menghalangi seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas adalah tingginya biaya kuliah dan kondisi ekonomi keluarga. Responden (10/05/2026 11:39:27) menggarisbawahi bahwa bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, pembiayaan kuliah terasa sangat memberatkan secara finansial. Ketika akses terhadap perguruan tinggi dikendalikan oleh kekuatan modal, universitas tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi sosialnya sebagai alat penyetaraan, melainkan bergeser menjadi instrumen pudarnya nilai meritokrasi di Indonesia (Prasetyo & Kurniawan, 2023). Beban biaya di hulu yang sangat besar, jika dikonfrontasikan dengan sempitnya peluang kerja serta fenomena

pengangguran terdidik di hilir, memperkuat rasionalisasi di kalangan masyarakat marjinal untuk melabeli kuliah sebagai jebakan finansial atau scam (Prawira, 2024).

Struktur Sosial Kredensial dan Bertahannya Prasyarat Ijazah

Sebuah pertanyaan sosiologis mendasar muncul: jika disfungsi institusional perguruan tinggi begitu nyata dan narasi scam meluas, mengapa universitas tetap bertahan eksis? Hal ini terjadi karena institusi birokrasi, pasar kerja swasta, dan regulasi negara telah terintegrasi secara interdependen dengan sistem legalitas akademik atau devaluasi ijazah yang memaksa pemenuhan kredensial tertentu (Windhiasih & Subroto, 2022). Rasionalitas struktural ini tercermin dari sikap informan yang menyatakan bahwa jika diberikan kesempatan untuk mengulang waktu, mereka akan tetap memilih jalur kuliah. Pilihan pragmatis tersebut dipaksa oleh struktur luar diri individu, yaitu adanya persyaratan kerja di mana banyak sektor pekerjaan formal tetap mewajibkan syarat ijazah minimal S1. Penyesuaian yang mungkin dilakukan terbatas pada tingkat mikro berupa penyesuaian minat, yakni mempertimbangkan untuk berpindah ke program studi atau jurusan lain yang lebih sesuai dengan keinginan dan minat terdalam mereka. Sentimen serupa terekam dalam data angket, dimana responden (10/05/2026 11:34:25) menyatakan bahwa dalam realitas zaman sekarang, seseorang dituntut berpendidikan tinggi agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan secara cepat. Tindakan mahasiswa untuk tetap mengonsumsi pendidikan tinggi, terlepas dari segala disfungsinya, adalah bentuk adaptasi rasional-pragmatis demi bertahan hidup di dalam struktur sosial yang menuntut sertifikasi formal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena anggapan bahwa kuliah merupakan *scam* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap pendidikan tinggi, melainkan sebagai refleksi atas berbagai disfungsi yang terjadi dalam sistem pendidikan tinggi kontemporer. Dalam perspektif fungsionalisme Émile Durkheim, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai institusi yang mentransmisikan nilai-nilai sosial, membentuk moral kolektif, serta mempersiapkan individu untuk menjalankan peran dalam pembagian kerja masyarakat modern (Maliq & Malik, 2022; Pope, 1975). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian fungsi tersebut mengalami pelemahan akibat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan realitas yang dihadapi lulusan setelah menyelesaikan studi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya praktik kecurangan akademik, terutama dalam sistem pembelajaran dan evaluasi daring, telah berkontribusi pada menurunnya kepercayaan terhadap nilai ijazah sebagai representasi kompetensi. Kondisi ini mencerminkan gejala anomie, yaitu melemahnya kekuatan norma sosial yang sebelumnya mengatur keyakinan bahwa pendidikan tinggi merupakan jalur utama menuju keberhasilan sosial dan ekonomi (Durkheim dalam Maunah, 2016). Ketika norma tersebut tidak lagi selaras dengan kenyataan berupa tingginya angka pengangguran terdidik, ketidakpastian pasar kerja, dan meningkatnya biaya pendidikan, muncul keraguan terhadap efektivitas pendidikan tinggi dalam menjamin mobilitas sosial.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan munculnya berbagai alternatif jalur karier di luar pendidikan formal turut mengubah persepsi generasi muda terhadap fungsi perguruan tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta kemampuan adaptasi dinilai lebih menentukan keberhasilan dibandingkan kepemilikan ijazah semata. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi meritokrasi, yaitu ketika pendidikan tidak lagi sepenuhnya mampu menjalankan fungsi alokasi peran sosial berdasarkan kompetensi sebagaimana diasumsikan dalam perspektif fungsionalisme (Harahap et al., 2023; Malik & Malik, 2022).

Penelitian juga menemukan bahwa tingginya biaya pendidikan dan keterbatasan kondisi ekonomi keluarga masih menjadi hambatan utama dalam mengakses pendidikan tinggi. Situasi tersebut memperkuat pandangan bahwa perguruan tinggi cenderung memproduksi ketimpangan sosial daripada menjadi sarana mobilitas sosial yang inklusif (Gao, 2021). Meski demikian, mayoritas informan tetap menganggap pendidikan tinggi memiliki nilai penting, terutama sebagai sarana pengembangan kapasitas intelektual, pembentukan karakter, perluasan jaringan sosial, dan pemenuhan persyaratan administratif dalam dunia kerja formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena "kuliah sebagai scam" merupakan manifestasi dari krisis kepercayaan terhadap fungsi pendidikan tinggi yang dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Meskipun pendidikan tinggi masih menjalankan sejumlah fungsi sosial penting, diperlukan transformasi yang lebih adaptif melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan integritas akademik, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Upaya tersebut diperlukan agar perguruan tinggi dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam membangun solidaritas sosial dan mempersiapkan individu menghadapi tantangan masyarakat modern (Harahap et al., 2023; Fullan, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan fungsi pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Pertama, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum secara berkelanjutan agar lebih relevan dengan perkembangan dunia kerja, kemajuan teknologi digital, serta kebutuhan masyarakat. Penguatan keterampilan praktis (*hard skills*) dan keterampilan sosial (*soft skills*) perlu diintegrasikan secara seimbang dengan penguasaan teori akademik sehingga lulusan memiliki kompetensi yang lebih adaptif dan kompetitif (Fullan, 2020; Rohmawati et al., 2025).

Kedua, institusi pendidikan tinggi perlu memperkuat integritas akademik melalui sistem evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap praktik kecurangan akademik, khususnya pada pembelajaran dan ujian berbasis daring, harus ditingkatkan agar nilai akademik dan ijazah tetap memiliki legitimasi sebagai indikator kompetensi yang sesungguhnya (Prawira, 2024; Windhiasih & Subroto, 2022).

Ketiga, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif melalui peningkatan program beasiswa, bantuan pendidikan, dan kebijakan pembiayaan yang lebih terjangkau. Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan serta memperkuat fungsi perguruan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Gao, 2021).

Keempat, perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia industri, sektor profesional, dan berbagai lembaga sosial agar proses pembelajaran lebih selaras dengan kebutuhan lapangan kerja. Program magang, pelatihan profesional, dan pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi alternatif untuk mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan dunia kerja (Harahap et al., 2023).

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena anggapan kuliah sebagai scam. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkombinasikan perspektif fungsionalisme dengan teori konflik atau teori reproduksi sosial sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika pendidikan tinggi di era modern (Maliq & Malik, 2022).

DAFTAR REFERENSI

- Almuarif. (2024). Solidaritas dan integrasi sosial dalam konteks manajemen pendidikan: Analisis berdasarkan teori Émile Durkheim. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*. <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/view/80139>
- Durkheim, É. (1951). *Suicide: A study in sociology*. Free Press. (Original work published 1897)
- Durkheim, É. (1982). *The rules of sociological method*. Free Press. (Original work published 1895). <https://doi.org/10.1007/978-1-349-16939-9>
- Durkheim, É. (1997). *The division of labor in society*. Free Press. (Original work published 1893)
- Fullan, M. (2020). *The new meaning of educational change* (6th ed.). Routledge.
- Gao, Y. (2021a). Commercialization of higher education and social inequality: Challenges for educational equity. *Higher Education Studies*, 11(3), 45–53.
- Gao, Y. (2021b). How harmful is the commercialization of higher education for the academic and social environment? *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.32629/jher.v2i6.586>
- Harahap, A., et al. (2023). Integrasi sosial dan peran pendidikan dalam perspektif fungsionalisme. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(2), 115–128.
- Harahap, N. I. Y., Hanani, S., Iqbal, M., & Pratama, A. R. (2023). Peran pendidikan Islam dalam mempertahankan integrasi sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1599>
- Malik, A., & Malik, S. (2022). Functionalism and education: Revisiting Durkheim's perspective in contemporary society. *International Journal of Sociology and Education*, 11(1), 1–15.
- Malik, H. A., & Malik, F. A. (2022). Emile Durkheim contributions to sociology. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 6(2), 7–10. https://www.researchgate.net/publication/358928658_Emile_Durkheim_Contributions_to_Sociology
- Malik, S., & Malik, R. (2022). Functionalism and the role of education in contemporary society. *International Journal of Sociology and Education*, 14(1), 22–35.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, T. (2023). Komodifikasi pendidikan tinggi dan pudarnya nilai meritokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 11(2), 112–125.
- Prawira, R. (2024a). Anomie akademik pada era pembelajaran digital. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(1), 22–37.
- Prawira, R. (2024b). Pengangguran terdidik dan fenomena anomi di kalangan Gen Z Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1), 34–48.
- Rohmawati, H. S., Zulkifli, & Hakiem, N. (2025). Mediatization and hypermediation in digital religion and the transformation of Indonesian Muslim religious practices through social media usage. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(2), 133–150. <https://doi.org/10.14421/jsa.2024.182-01>
- Rohmawati, N., Zulkifli, M., & Hakiem, A. (2025). Transformasi pendidikan tinggi di era

digital dan tantangan relevansi kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 10(1), 75–89.

Sutopo, O. R. (2021). Konstruksi karier pemuda di era ekonomi digital: Peluang dan ketidakpastian. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(2), 89–103.

Wibowo, A. (2022). Dilema ujian daring: Evaluasi kejujuran akademik dalam sistem pendidikan tinggi masa kini. *Jurnal Integritas Akademik*, 6(2), 145–159.

Windhiasih, R., & Subroto, W. T. (2022). Komodifikasi pendidikan dan devaluasi ijazah dalam masyarakat modern. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(3), 210–223.

Windhiasih, S., & Subroto, A. (2022). Devaluasi ijazah dan komodifikasi pendidikan tinggi di Indonesia: Perspektif sosiologi ekonomi. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 14(1), 45–58.